

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak keluarnya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tampaknya pemerintah membuat kewenangan urusan pemerintahan menjadi lebih detail. Perkembangan otonomi daerah menjadi semakin mapan dalam pengukuhan kewenangan peran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dalam mengelola urusan pemerintahan.

Dalam mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah sudah harus mengganti prinsip "*money follow function*" menjadi "*money follow program*". Dimana dalam pengimplementasiannya pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pendanaan melalui transfer dengan jumlah yang cukup besar. Sumber pendanaan ini nantinya akan digunakan dalam membelanjakan kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan program dan prioritas daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah yang luas merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan pemerintah lebih dekat dan transparansi penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kewenangan yang semakin luas tersebut, pemerintah perlu memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup pengelolaan keuangan meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Perencanaan menjadi hal yang paling utama dilakukan pengelola keuangan daerah dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran uang daerah. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara, dimana pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas yang cukup penting dalam melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yakni membuat perencanaan kas dan menetapkan kas minimal untuk menentukan strategi manajemen kas. Strategi manajemen kas digunakan untuk memperoleh persediaan kas saat terjadi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas dalam investasi.

Salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam mengelola kas daerah (Mahmudi, 2010). Kas daerah yang dimaksud adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Perencanaan kas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses anggaran pemerintah secara keseluruhan, tanpa adanya anggaran kas, pengelola keuangan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Anggaran kas memuat informasi tentang rencana arus kas masuk dan arus kas keluar untuk belanja dan penggunaan lainnya. Dengan demikian, estimasi atas arus masuk harus sesuai dengan estimasi arus keluarnya agar tidak terjadi kekurangan kas dan dapat mengelola kelebihan kas untuk mengoptimalkan investasi.

Dalam penelitian sebelumnya, Arif Subekti (2010) menyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan kas yang diharapkan mampu menjaga likuiditas dan memberi manfaat bagi pendapatan daerah perlu diketahui pola (*pattern*) dari setiap aktivitas kas secara periodik, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Pola tersebut dapat digunakan untuk memproyeksikan pengeluaran dan penerimaan kas yang akan terjadi, serta digunakan dalam merencanakan investasi jangka pendek atas kas menganggur (*idle cash*) atau pembiayaan jangka pendek untuk menutup kekurangan kas.

Kurang optimalnya fungsi manajemen kas dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Dari tabel realisasi anggaran Pemko Pariaman tahun 2015 dapat diketahui (1) Selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja yang cukup besar terutama di bagian belanja dengan persentase tertinggi di belanja tak terduga sebesar 86,10%, (2) Peramalan kondisi kas pada tahun 2015 mengalami defisit Rp99.143.933,046,77 ternyata setelah realisasi mengalami surplus Rp116.671.976.110,27.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Pariaman tahun Anggaran 2015

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
	Th 2015	Th 2015		
<u>PENDAPATAN</u>	584.071.942.21	573.491.864.431,50	(10.580.077.786,50)	(1,81)
PAD yang Sah	27.451.580.059,	29.917.289.136,50	2.465.709.077,50	8,9
P. Transfer	556.620.362.15	543.574.575.295,00	(13.045.786.864,00)	(2,34)
<u>BELANJA</u>	683.215.875.26	555.963.821.368,00	(127.252.053.896,77)	(18,62)
B. Operasi	491.667.729.08	385.633.649.278,00	(106.034.079.803,77)	(21,56)
B. Modal	190.548.146.18	170.191.189.290,00	(20.356.956.893,00)	(10,68)
B. Tak Terduga	1.000.000.000,0	138.982.800,00	(861.017.200,00)	(86,10)
<u>SURPLUS/ DEFISIT</u>	(99.143.933.046	17.528.043.063,50	116.671.976.110,27	

Pada kondisi diatas pemerintah daerah belum bisa memproyeksi secara akurat arus kas masuk dan kas keluar selama tahun 2015, sehingga tidak mencerminkan pola dasar bagi manajemen keuangan daerah dalam menentukan strategi pengelolaan kas, baik investasi jangka pendek atas *idle cash* maupun pembiayaan jangka pendek untuk menutup kekurangan kas.

Selain itu dilihat dari angka realisasi, bunga deposito tahun 2015 yang mengalami peningkatan lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini akan memerlukan pengelolaan anggaran kas yang baik agar bunga deposito dapat dimanfaatkan dalam rangka menutup defisit atau optimalisasi PAD. Angka Realisasi deposito dan pendapatan bunga deposito tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Realisasi Deposito dan Bunga Deposito tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Deposito	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	88.000,00
Bunga deposito	839,70	778,82	775,66	850,00	4.487,134

Peramalan yang masih bersifat *judgement* atau masih menggunakan perkiraan/ pengalaman tahun lalu masih belum bisa menghasilkan anggaran kas yang bagus. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu pegawai DPKA Pemerintah Kota Pariaman yang menyebutkan penetapan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah ditentukan dengan memperkirakan angka berdasar pengalaman kejadian-kejadian masa sebelumnya yang digabungkan dengan intuisi peramal dalam menghasilkan perkiraan realisasi anggaran di masa mendatang. Setelah anggaran tersebut masuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja

daerah, anggaran akan dibahas dengan DPRD untuk selanjutnya dilakukan pengesahan.

Sedangkan didalam perkembangan peramalan kas terdapat metode yang terbukti lebih akurat dibandingkan metode *judgement*, yakni metode analisis *time series* (runtun waktu). Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Peramalan Kas Dengan Menggunakan *Time Series* Dalam Mendukung Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Pariaman**”.

1.2. Ruang Lingkup

Batasan ruang lingkup dilakukan agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data penelitian yang akan digunakan untuk memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran kas adalah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2011-2015.
2. Peramalan kas daerah meliputi peramalan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2017.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan dan ruang lingkup penelitian diatas, maka masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2011 sampai dengan 2015?

2. Bagaimana proyeksi anggaran kas pada tahun 2017 dengan menggunakan metode *time series* untuk peramalan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengelolaan kas yang dapat menjaga likuiditas kas Pemerintah Kota Pariaman dan mengoptimalkan pendapatan daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pola penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2011 sampai dengan 2015.
2. Evaluasi keakuratan proyeksi anggaran kas oleh Pemerintah Kota Pariaman dibandingkan dengan proyeksi menggunakan metode *time series*.
3. Membantu pengelolaan kas Pemerintah Kota Pariaman dalam menjaga likuiditas dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil proyeksi dapat memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam proses perencanaan anggaran.
2. Dapat jadi acuan pmda dalam menjaga likuiditas kas pemerintah daerah.
3. Dengan mengetahui simulasi penempatan kas menganggur dapat meningkatkan penerimaan kas daerah.